

PENDIDIKAN PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Refleksi Terhadap Pendidikan Jarak Jauh UT)

Oleh : Angelina Sondakh, SE
Anggota DPR-RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat

PENDAHULUAN

Perempuan dan pendidikan dalam era terbuka dan modernitas kerap menjadi diskursus yang tidak pernah kering dibicarakan. Isu itu termasuk sangat aktual dalam ranah politik kontemporer. Isu perempuan misalnya masih sering diperdebatkan kalangan mengingat posisinya yang belum sejajar dengan kaum laki-laki. Bagi kaum feminis dunia hari ini harus mengakui posisi perempuan dalam semua sektor kehidupan. Karena itu kaum perempuan harus punya hak yang sama dalam mengakses pendidikan seluas-luasnya.

Kondisi itu tentu sangat positif bagi kaum perempuan yang ingin berpartisipasi dalam mengisi pembangunan. Karena rintangan budaya paternalistik semakin lama semakin tidak populer di kalangan masyarakat. Dan dalam konteks pembangunan bangsa kedepan di syarkan bagi semua elemen bangsa untuk dapat menyumbangkan karyanya bagi kemajuan bangsa dan negara. Kaum perempuan yang merupakan salah satu bagian dari potensi itu tentu punya peluang besar agar bangsa ini bisa maju melalui peran dan kontribusi yang diberikannya. Ini artinya jasa-jasa kaum perempuan itu tidak sedikit sudah dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini. Salah satu dari mereka yang bisa dikenang yaitu RA. Kartini. Wanita Jawa yang besar dalam lingkungan keraton itu adalah perintis gerakan perempuan dalam melawan hegemoni penjajah juga kaum laki-laki di Indonesia.

Akar sejarah itu membuka wawasan kaum perempuan agar tidak tinggal diam dalam membesarkan nama bangsa dimata dunia internasional. Jadi Kartini tidak hanya harum dalam peta sejarah perjuangan kaum perempuan untuk wanita Indonesia umumnya, tapi ia juga pelopor perempuan pertama Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia melalui goresan pikirannya '*Habis Gelap Terbitlah Terang*'. Buku bersejarah itu adalah hasil surat menyuratnya dengan seorang perempuan di negara Belanda adalah bukti gagasan seorang perempuan yang 'memberontak' pada nilai-nilai paternalis dan penjajahan.

Gagasan Kartini yang brilian itu sekarang diperingati oleh perempuan Indonesia sebagai tonggak kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Jejak -jejaknya sekarang telah memberi inspirasi bagi perempuan dalam setiap zaman. Di masa kemerdekaan lahir pahlawan-pahlawan perempuan yaitu Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dhien yang ikut mengusir penjajah dari Indonesia. Sementara dalam era pemerintahan Soekarno tak ketinggalan partisipasi kaum perempuan dalam mengisi kemerdekaan dalam kabinet Soekarno. Masih di era revolusi pemerintahan Soekarno, ada seorang perempuan yang di juluki si pending emas sebagai penerjun payung pertama yang ikut melepas propinsi Papua - dulu Irian Barat - dari belunggu penjajahan tentara Belanda.

Sumbangsih perempuan terus berlanjut sampai sekarang ini. Perempuan tidak pernah ketinggalan dalam memberi sumbangsih kemerdekaan maupun pembangunan pada negara ini lewat karya dan pikiran-pikirannya bagi kemajuan bangsa ini. Karena itu maju mundurnya negara ini juga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Sejarah bahwa perempuan juga punya andil besar dalam memberi saham buat kemajuan negara, maka harus kiranya perempuan Indonesia memiliki pengetahuan yang lebih dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Globalisasi dunia luar yang mempengaruhi nilai-nilai lokal harus bisa diatasi kaum perempuan dengan jitu! Perempuan itu harus memiliki nilai-nilai yang dapat memfilter nilai-nilai negatif yang merusak dan merongrong bangsa kita.

Salah satu yang bisa membantu perempuan tangguh menghadapi pasar bebas dan globalisasi yaitu pendidikan. Pendidikan yaitu sarana yang dapat membantu dan menciptakan manusia-manusia yang memiliki kualitas iman dan ilmu. Bangsa ini harus memperbaiki kualitas pendidikan maupun kesempatan bagi masyarakat seluas-luasnya dalam hal pendidikan. Karena dengan cara ini kualitas manusia Indonesia yang baik dan kompetitif dapat kita wujudkan. Dan tentu kaum perempuan juga sangat membutuhkan pendidikan yang bermutu. Persoalannya dunia pendidikan kita masih berada dalam era transisi ; era sentralistik ke desentralisasi. Sebuah perubahan yang hingga kini masih melakukan berbagai perbaikan atau reformasi disana-sini. Oleh karena itu kita harus memaklumi tuntutan besar sebagian masyarakat yang belum puas dengan kebijakan pendidikan yang ada sekarang.

Hal itu bukan berarti kita menomorduakan pendidikan. Tapi capaian-capain reformasi yang ideal memang harus terus di reformasi. Maklum yang ideal tidak semudah membalik telapak tangan. Semua butuh waktu! Terlepas dari itu, pendidikan itu out-putnya adalah memperbaiki kualitas manusia. Dalam data Indeks pendidikan (HDI), Indonesia berada di

peringkat 112 dari 114 negara di dunia. Hal itu mencerminkan betapa rendah perhatian negara kita pada pendidikan dibanding negara lain. Dengan negara tetangga kita Malaysia kita sudah jauh tertinggal. Padahal semua orang tahu bahwa pada tahun-tahun 1980-an kita sebagai pengeksport guru untuk mengajar mereka agar menjadi negara yang maju. Namun 20 tahun kemudian kita yang harus belajar ke negara mereka tentang kemajuan. Apa yang salah dari kita sebagai bangsa? Kita terlalu memprioritaskan pembangunan fisik. Sementara mereka lebih memprioritaskan pembangunan negaranya pada pembangunan sumber daya manusia. Itu tampak dari alokasi kebijakan pemerintah kedua negara ini dalam pengalokasian dana pembangunannya selama dipimpin masing - masing presiden pendahulunya. Soeharto pro pembangunan fisik, sementara Mahathir Mohammad pro pembangunan manusianya dalam membangun Malaysia.

Kembali pada persoalan perempuan dan pendidikan di Indonesia. Saat ini kita dibombardir oleh arus negatif pasar bebas di semua lini kehidupan. Dan seringkali korbannya banyak dari kaum perempuan itu sendiri. Dan hingga kini formula pemerintah mengatasi dampak globalisasi itu sifatnya masih sebatas kulit. Yang tentu cara ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya secara tuntas. Coba lihat suksesnya aparat pemerintah (polisi dan trantib) menangkap dan menggerebek jaringan kejahatan yang sering kita saksikan di media massa. Tapi kenapa upaya itu tidak pernah selesai atau memberi efek jera. Atau pada kesempatan yang lain bermunculan kasus-kasus yang sama muncul dan muncul lagi. Lihat misalnya penggerebekan dan penangkapan wanita sosial (WTS) atau *trafficking* penjualan perempuan ke luar negeri yang tidak pernah habis. Ini karena akar dari masalah itu yang tidak tersentuh. Karena itu memutus mata rantai penyakit sosial itu membutuhkan formula yang jitu dan tepat. Salah satunya yaitu melalui lembaga pendidikan. Terkait dengan itu, Pancasila dan UUD 1945 negara kita telah menganjurkan seluruh anak pria dan perempuan berusia 5 - 12 tahun wajib masuk sekolah. Dan wajib belajar 9 tahun. Landasan konstitusi itu menunjukkan bahwa sejak negara ini berdiri kita sudah memerangi kebodohan atau buta huruf di kalangan masyarakat kita.

Dalam perjalanan sejarah, misi konstitusi itu berhasil membuat masyarakat kita selama masa pemerintahan Soeharto berhasil melek huruf melalui program penentasan buta aksara di desa-desa pada kalangan kaum manula. Namun bisa baca atau melek huruf ternyata bukan jaminan buat bangsa kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebuah situasi yang hingga kini belum bisa kita selesaikan. Itu artinya misi pembangunan kita masih harus terus di galakan secara maksimal. Dan pendidikan menjadi sarana dalam

menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mengelola alam kita yang berlimpah demi kemakmuran kita bersama. Inilah cita-cita dari negara ini di dirikan oleh *founding father* dan *mother* kita dahulu. Dan tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk tidak melakukan perbaikan agar kita bisa menjadi bangsa yang tangguh dalam percaturan global nantinya.

Namun bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan dunia luar bila pendidikan yang kita banggakan itu ternyata sangat jauh dari harapan yang ada. Kualitas generasi bangsa yang dapat di cetak melalui bangku pendidikan atau sekolah selama ini terbukti ada yang salah. Dalam data tahun 1999 mata pelajaran matematika dan fisika bangsa kita berada di peringkat ke-32 dari 38 negara di dunia. Di Asia sendiri kita masih lebih baik dari Filipina dan lebih buruk dari tetangga kita Malaysia yang berada di peringkat ke-24 di atas kita. Berikut data-data tersebut :

Negara	Nilai & Tingkat Matematika	Nilai & Tingkat Fisika
Singapura	604 (1)	568 (2)
Korea	587 (2)	549 (5)
Taiwan	585 (3)	569 (1)
Hongkong	582 (4)	530 (15)
Jepang	579 (5)	550 (4)
Malaysia	519 (16)	492(22)
Thailand	467 (27)	482 (24)
Indonesia	403 (34)	435 (32)
Filipina	348 (36)	345 (36)

Dikutip : Trend di Studi Mate-matika dan ilmu pengetahuan internasional, 1999

Data diatas dalam catatan lembaga survey perusahaan Jepang yang beroperasi di Asia dipakai sebagai sarana mengukur kesiapan suatu negara menyiapkan tenaga ahli dalam mengelola perusahaan asing yang masuk di suatu negara. Menurutnya lagi, Indonesia adalah negara yang paling tidak siap dalam hal kesiapan tenaga ahli saat masuknya perusahaan asing di negara Indonesia¹.

¹) *Baca kompas online, Indonesia policy briefs - ide-ide 100 hari*

REALITAS PEREMPUAN DI INDONESIA

Steven Allen seorang kepala perwakilan dari UNICEF mengatakan ada perbedaan besar angka putus sekolah antara anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. 10 orang yang berhenti sekolah pertahun, 6 diantaranya adalah perempuan. Selanjutnya, kelompok perempuan juga termasuk yang paling tinggi angka buta hurufnya dibanding kaum laki-laki. Kenyataan angka ketertinggalan dan merosotnya kualitas kaum perempuan itu semakin memperkuat data yang ada yang mempublikasikan negara Indonesia sangat lemah dalam bidang ekonomi, dibanding beberapa negara di kawasan asia timur dan pasifik seperti China, Malaysia, Singapaura dan Philipina.²

Masih tentang hambatan-hambatan pada kaum perempuan Indonesia. Pendidikan yang belum berpihak pada kaum perempuan dapat pula ditemui dalam bidang lain. Misalnya dalam bidang kesehatan dan pekerjaan. Perusahaan masih banyak yang belum memberi lapangan kerja pada perempuan. Angka perempuan menganggur lebih tinggi dapat ditemui dimana-mana dibanding laki-laki. Kalaupun perempuan banyak ditemui bekerja disektor informal (pabrik) itu bukan berarti hilangnya diskriminasi. Angka kaum perempuan upahnya tidak dibayar oleh perusahaan mencapai 41,3% lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 10% menjadi bukti beban yang diterima perempuan diluar rumah. Sementara di dalam rumah, hambatan keluarga dan mengurus anak serta kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakannya membuat perempuan kerap susah bisa mengurus dirinya sendiri. Ini yang membuat kaum perempuan begitu susah mengembangkan dirinya dan potensinya secara maksimal.³ Dan kemiskinan yang melilit bangsa ini paling banyak dari kelompok kaum perempuan. Dalam data yang lain disebutkan wanita yang menamatkan perguruan tinggi dan akademi hanya 2,43% dari angka 35, 83% yang dimiliki laki-laki.

Angka itu jelas membutuhkan kerja keras perempuan. Bagaimana tidak negara yang 50% lebih populasinya perempuan dan memiliki posisi paling sentral dalam rumah tangga. Namun dalam realitas ternyata adalah komunitas yang paling merasakan kemiskinan dan kemelaratan yang menimpa negara saat krisis ekonomi tahun 1996 terjadi. Dan PHK besar-besaran korbannya mayoritas adalah perempuan. Kondisi itu adalah realitas yang harus diperbaiki oleh kaum perempuan sendiri, karena peran diluar institusi perempuan belum banyak yang berpihak untuk perempuan.

²) _____ *pendidikan anak perempuan di Indonesia masih tertinggal*

³) *Baca Indonesian News - Perempuan Nyaris Gagal Nikmati Hasil Pembangunan, 2006*

PENDIDIKAN (JARAK JAUH) DAN PEMBERDAYAAN GENDER

Pendidikan yang mencerdaskan bangsa serta kompetitif dalam dunia global mutlak diperlukan oleh seluruh komponen bangsa dalam menghadapi semua persoalan di semua lini kehidupan. Artinya angka putus sekolah yang tinggi serta masih tingginya angka diskriminasi - rendahnya angka lulusan perguruan tinggi pada kaum perempuan serta masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan Indonesia- serta kekerasan rumah tangga perempuan harus segera di reformasi. Tanpa itu posisi penting dalam pembangunan nasional tidak akan dirasakan kaum perempuan. Oleh sebab itu masalah tersebut harus bisa diatasi bila perempuan ingin ada dalam posisinya yang sejajar dengan elemen-elemen lain di dalam mengisi arti kemerdekaan yang sudah diperoleh 66 tahun silam oleh bangsa kita.

Reformasi yang paling mendasar yaitu memberdayakan kaum perempuan itu sendiri. Pemberdayaan itu harus mampu menyentuh akar persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Bidang - bidang paling strategis yang membuat perempuan termarginalkan harus diangkat secara tuntas. Masalah kekerasan rumah tangga yang begitu tinggi menimpa perempuan harus diselesaikan melalui advokasi dan sosialisasi UU KDRT (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang masih minim dilakukan oleh pemerintah. Sementara pada masalah kesempatan yang timpang yang membuat akses perempuan terhadap pendidikan yang minim harus diselesaikan dengan cara membuka kultur tertutup melalui pemberdayaan secara terus-menerus. Maklum sebagian masyarakat masih memandang perempuan adalah kelas kedua dalam memperoleh pendidikan. Atau perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Pikiran itu banyak ditemui dalam masyarakat pedesaan.

Kondisi tersebut harus di reformasi melalui penguatan kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada. Yang targetnya membangun kesadaran perempuan untuk mampu berpikir dan bertindak dalam domain system yang demokratis. Menumbuhkan kembangkan kesadaran itu tidaklah mudah. Pasalnya kaum perempuan yang punya pendidikan baik dengan yang sama sekali tidak sama-sama memiliki masalah dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang satu dihadapkan pada eksese negatif dari globalisasi. Sementara yang satunya - tidak terdidik - menghadapi kedua-duanya. Eksese globalisasi juga kuatnya budaya patriarkhi.

Terlepas dari masalah itu tugas kaum terdidik atau lulusan perguruan tinggi yang diperoleh kaum perempuan harusnya memikul tanggung jawab riil yang ada dalam lingkungan masyarakatnya sebagai bagian dari tugasnya sebagai insan akademis. Insan

yang harus mampu berbakti atau berderma dengan ilmu yang dipeolehnya. Dalam angka disebutkan bahwa mereka yang tidak berpendidikan itu adalah kelompok terkategori miskin. Mereka itu patut menjadi garapan kaum terdidik dari lembaga pendidikan nantinya. Dan karena itu tugas lembaga pendidikan yang pada dasarnya sebagai lembaga pengajaran dan pendidikan kini harus lebih maju dalam melihat realitas bangsa secara kontekstual. Perguruan Tinggi ITB (Institut Teknologi Bandung) misalnya kini telah memposisikan visinya sebagai lembaga riset dan pengembangan dalam memajukan bangsa dan negara di bidang teknologi dan riset dalam menyiasati pasar bebas.⁴ Dan bila melihat realitas negara-negara lain yang sudah mengalokasikan dana begitu besar serta wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun sangat mungkin semakin meninggalkan negara kita nantinya. Dua negara ini - Thailand dan Malaysia - menargetkan pada tahun 2010 partisipasi lulusan universitas dalam pembangunan negaranya dapat menjadi kompetitor yang tangguh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Malaysia misalnya sudah menyiapkan alokasi dana 40% buat pendidikan pada tahun 2010 nanti. Sementara Thailand mewajibkan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun buat negaranya. Ini diambil karena bangsa-bangsa kedepan akan bersaing tidak hanya dalam bidang teknologi, tapi sumber daya manusianya juga menjadi sangat penting dalam menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan perusahaan asing yang masuk di suatu negara.nantinya⁵.

Dalam konteks itu, Universitas Terbuka (UT) dapat pula mengambil peran penting yang sama dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dengan daya saing yang tak kalah dengan universitas-universitas terkemuka untuk menyiapkan kader-kader bangsa yang tangguh dalam menghadapi pasar bebas. UT yang tangguh sangat mungkin dapat berdiri sejajar dalam melahirkan lulusan-lulusan berkualitas dengan akreditasi yang diperolehnya dari *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) sebagai universitas terbuka yang memenuhi standar internasional. Lembaga pendidikan terbuka dan jarak jauh di dunia yang berbasis di Oslo, AS ini telah memeriksa semua standar dan mutu UT ini telah memenuhi kualifikasi terbaik. Bahkan dalam bahan ajar dan pelayanannya UT mendapat ISO 9001:2000 dari SAI Global milik Australia. Ini adalah predikat luar biasa bagi sebuah universitas yang memang tidak mudah diperoleh sebuah lembaga pendidikan yang menjamur di Indonesia. Secara aplikatif pendidikan yang banyak bertumpu pada pengembangan kemandirian mahasiswa ini diperoleh melalui

⁴) *Baca Tempo edisi 13-19 November 2006*

⁵) *Baca, Kompas the world bank, 2006-----*

perangkat-perangkat modernisasi. Dan itu tidak harus melalui pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam ruangan secara langsung. Misalnya pendidikan jarak jauh yang dapat mengintegrasikan beberapa aspek pengalaman perempuan dengan informasi yang disediakan perguruan tinggi melalui perangkat modern (website dan internet) yang dimiliki UT yang ada. Ini yang harus disediakan UT dalam mendesain pembelajaran bagi perempuan yang menuntut ilmu dalam pendidikan jarak jauh yang ada. Berikut beberapa hal yang harus dipenuhi UT dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pendidikan yang ada, dengan capaian-capaian yang diinginkan sebagai berikut:

- (1). Pendidikan tatap muka ini harus menyediakan informasi tentang perkembangan dan kemajuan kaum perempuan secara global.
- (2). Pendidikan ini juga harus memberi informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam semua sektor pembangunan yang ada.
- (3). Perguruan ini harus mampu menjadi ujung tombak lembaga pendidikan yang ikut peduli pada nasib perempuan Indonesia.
- (4). Dan yang paling penting tenaga pengajar yang ada harus ikut terlibat dalam mendesain pengajaran dan memberdayakan mahasiswanya agar menjadi lulusan yang peduli pada masalah yang dialami kaum perempuan Indonesia.

Poin-poin pembelajaran diatas sangat mungkin menjadi alternatif dari system pendidikan yang ada selama ini. Atau pendidikan dengan system yang berbeda. Tapi mampu mengintegrasikan mahasiswa yang menuntut ilmu dengan realitas yang ditemui kaum perempuan yang belum menguntungkan posisinya. Dan dari program ini standar kualifikasi yang berkualitas pada saat menamatkan pendidikan tingginya tetap harus dipertahankan. Itu artinya UT adalah salah satu lembaga pendidikan dengan standar dan mutu yang teruji juga berhasil membuka kesempatan bagi mahasiswa yang sibuk untuk memperoleh kesempatan untuk meluluskan calon-calon generasi bangsa dengan baik. Dan mereka yang selama ini belum terakomodir dalam pola pendidikan tatap muka, akan sangat tepat memilih kurikulum jarak jauh pendidikan yang disediakan UT. Sudah pasti kaum perempuan dapat menjadi kelompok paling pas untuk merealisasikan visi-misinya berkontribusi dalam desain kebijakan bangsa yang besar ini. Kurikulum jarak jauh itu sangat bermanfaat bagi perempuan karena fleksibilitas yang ditawarkan begitu longgar. Yang pasti bagi perempuan sibuk bekerja akan memperoleh manfaat dari program ini. Mereka mendapatkan ilmu sekaligus dapat mengakses teknologi mutakhir yang ada. Dan ini sangat mungkin menutup *gap* antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam

pembangunan selama ini. Dan sudah pasti aspek paling penting dari pendidikan yaitu kualitas tidak diabaikan oleh UT.

Terlepas dari desain aplikatif UT, Data legalitas internasional lembaga pendidikan yang dimiliki UT sekaligus memberikan kepercayaan pada kita bahwa perguruan tinggi ini dapat menjadi salah satu lembaga pendidikan formal dalam membangun masa depan bangsa yang hingga kini belum beranjak baik. Dan bagi lulusan perempuan diharapkan alumni maupun perguruan tingginya akan terus memberi kontribusi dalam menuntaskan persoalan bangsa yang ada. Dan dari lembaga ini pula kita berharap kita bisa menjadi bangsa yang bahu-membahu dalam mendesain masa depan negara ini bisa menjadi lebih baik dari yang ada sekarang ini. Sudah pasti masalah yang melilit bangsa ini harus bisa diatasi kalau kita tidak ingin menjadi bangsa yang terpuruk. Caranya dari sekarang kita prioritaskan pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia sebagai instrumen menuju negara yang adil dan makmur. Dari situ negara ini bisa kita bangun dengan tangan-tangan terampil anak-anak bangsa secara kreatif tanpa intervensi yang berlebihan dari negara lain. Ini akan membuat negara kita bisa makmur karena kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya.

PENUTUP

Bangsa ini harus yakin bahwa generasinya mampu hidup sejajar bila kita buka peluang pendidikan dan pemberdayaan itu bisa berjalan seiring sebagai agenda penyelesaian masalah bangsa secara tuntas. Dan perempuan yang berjasa dalam merintis kemerdekaan juga bisa dirasakan perannya dalam pembangunan negara ini melalui perjuangan menentaskan kaumnya yang masih banyak yang tertinggal maupun termarginalkan dalam pembangunan yang belum berpihak pada perempuan selama ini. Artinya hak-hak yang sama dalam pembangunan bangsa dan negara ini tidak boleh dibangun secara parsial. Konstruksi pemikiran perempuan dan laki-laki yang *bias* gender dalam pembangunan yang kita lakukan dalam menentukan kebijakan negara dalam semua sektor harus dihilangkan. Pemikiran itu ternyata hanya menjadikan kita menjadi bangsa yang kerdil dalam pentas global. Dan itupula yang ikut membuat hak-hak perempuan sulit berkembang dalam berhadapan dengan eksese negatif budaya kompetisi pasar bebas.

Sudah waktunya generasi bangsa yang tercerahkan itu lahir menjadi penyelamat bangsa yang terpuruk karena keterbelakangan. Dan itu bisa hilang bila bangsa ini percaya pada peran lembaga pendidikan dalam membangun bangsa yang berkualitas dan maju. Saatnya

bangsa ini mulai dari pemerintah, masyarakat dan elemen penting di negara ini harus mau mendorong upaya negara ini untuk membangun bangsa tercinta ini untuk memprioritaskan pendidikan dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan kompetitif serta mandiri. Karena bukti negara-negara yang kuat dan maju yang kita saksikan lahir dari negara yang peduli pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lemahnya. Dan negara kita mayoritas perempuan dan paling rentan masalah harus bisa segera diangkat harkat dan martabatnya untuk bisa berkontribusi membangun bangsa ini secara bersama-sama. Dan pendidikan yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada harus kita bangun dan kita buka seluas-luasnya di negara ini. ****